



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI

(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Oktober 2016.
Pukul	: 22.00 WIB s/d Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E.,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabahset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Melanjutkan Raker Tanggal 18 Oktober 2016 Mengenai Penyesuaian RKA K/L TA 2017 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	: 37 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhadjir Effendy (Mendikbud RI) beserta jajarannya.

I. **PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 22.15 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

1. Mendikbud RI menyampaikan usulan PIP melalui KIP untuk tahun 2017 sbb:

Anggaran dalam ribu rupiah

No	Sekolah	Semula			Penyesuaian			Menjadi	
		Sasaran	Satuan	Anggaran	Sasaran	Harga Satuan	Anggaran	Sasaran	Anggaran
1	SD	10.360.614	Siswa	4.299.010.725	831.882	450	374.346.900	9.528.732	3.924.663.825
2	SMP	4.369.968	Siswa	2.769.033.482	350.878	750	263.158.500	4.019.090	2.505.874.982
3	SMA	1.367.559	Siswa	1.281.931.160	124.144	1.000	124.144.000	1.243.415	1.157.787.160
4	SMK	1.829.167	Siswa	1.214.376.326	132.532	1.000	132.532.000	1.696.635	1.081.844.326
	Jumlah	17.927.308	Siswa	9.564.351.693	1.439.436		894.181.400	16.487.872	8.670.170.293

2. Atas penyesuaian anggaran KIP sebesar Rp894,181 miliar sebagaimana dimaksud pada angka II.1 tersebut di atas, Mendikbud RI mengusulkan rencana pemanfaatan untuk:

- | | |
|--|-----------|
| a. Rehabilitasi ruang belajar | Rp348,3 M |
| b. Peralatan pendidikan | Rp375,8 M |
| c. Akreditasi sekolah/lembaga | Rp 25,0 M |
| d. Penambahan insentif guru non PNS & revitalisasi alat P4TK | Rp101,0 M |
| e. Revitalisasi desa adat dan fasilitasi komunitas budaya | Rp 25,0 M |
| f. Beasiswa unggulan dan bantuan Pemerintah | Rp 19,1 M |

3. Berdasarkan angka II.1 dan II.2, Mendikbud RI menyampaikan usulan rincian pagu di masing-masing unit kerja/eselon I adalah sbb:

(anggaran dalam miliar rupiah)

Unit Utama	Program	Usulan Awal	Usulan Pada Raker
Sekretariat Jenderal	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.849,59	1.868,73
Inspektorat Jenderal	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	194,19	194,19
Ditjen Dikdasmen	Program pendidikan dasar dan menengah	22.673,49	22.503,36
Ditjen PAUD dan Dikmas	Program paud dan dikmas	1.853,57	1.853,57
Balitbang	Program penelitian dan pengembangan	1.074,44	1.099,44
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra	403,43	403,43
Ditjen Kebudayaan	Program pelestarian budaya	1.877,05	1.902,05
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Program guru dan tenaga kependidikan	9.897,32	9.998,32
Total		39.823,12	39.823,12

4. Terhadap usulan penyesuaian PIP siswa usia 20-21 tahun, sebagaimana dimaksud pada nomor II.1 dan II.2, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI agar:

- Menggunakan data pokok pendidikan yang telah dilakukan validasi secara akurat.
- Ada mekanisme khusus di luar data pokok pendidikan agar dapat menjangkau siswa miskin dan rentan miskin yang harus mendapatkan KIP.
- Usulan rencana pemanfaatan untuk peralatan pendidikan semula Rp375 miliar menjadi Rp350 miliar.

- d. Usulan rencana pemanfaatan untuk revitalisasi desa adat dan fasilitasi komunitas budaya semula Rp25 miliar menjadi Rp 50 miliar.

5. Terhadap rincian anggaran di masing-masing unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada poin II.3 di atas, Komisi X DPR RI dapat menyetujui dengan rincian sbb:

Unit Utama	Program	Usulan Awal	Usulan Pada Raker	Keputusan Komisi X DPR RI
Sekretariat Jenderal	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1.849,59	1.868,73	1.868,73
Inspektorat Jenderal	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur	194,19	194,19	194,19
Ditjen Dikdasmen	Program pendidikan dasar dan menengah	22.673,49	22.503,36	22.478,36
Ditjen PAUD dan Dikmas	Program paud dan dikmas	1.853,57	1.853,57	1.853,57
Balitbang	Program penelitian dan pengembangan	1.074,44	1.099,44	1.099,44
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra	403,43	403,43	403,43
Ditjen Kebudayaan	Program pelestarian budaya	1.877,05	1.902,05	1.927,05
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Program guru dan tenaga kependidikan	9.897,32	9.998,32	9.998,32
Total		39.823,12	39.823,12	39.823,12

6. Terhadap rincian RAPBN TA 2017 sebagaimana dimaksud pada nomor II.5 tersebut di atas, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk:
- Menyusun kembali skala prioritas (*refocusing*) program/kegiatan yang diusulkan pada RAPBN TA 2017 dengan memperhatikan rencana strategis, RKP, indikator dan evaluasi target yang telah dicapai, dan sasaran yang lebih nyata kebermanfaatannya untuk masyarakat.
 - Melaksanakan RAPBN TA 2017 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Mensinergikan dan mengkoordinasikan dengan K/L lain dan Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan program seperti program USB, sekolah yang direnovasi, guru mengajar di daerah 3T, museum yang dibangun/direvitalisasi, dan desa adat yang direvitalisasi.

7. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Tugas khusus kepada Mendikbud untuk:
- Membuat peta jalan pengembangan SMK.
 - Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*).
 - Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.
 - Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri.
 - Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK.
 - Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.
8. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melakukan pendalaman kondisi sekolah, ruang kelas, dan alat pendidikan di masing-masing jenjang pendidikan, melalui Rapat Panja Sarpras Dikdasmen yang direncanakan dijadwalkan pada bulan November 2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 23.55 WIB

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI



MUHADJIR EFFENDY

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH S.E., M.M